

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AKHLAK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA KABUPATEN BANGKA

Doni¹, Dafyar Eliadi H², Hardjito S Darmojo³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Correspondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Pendidikan akhlak memiliki peran sentral dalam membentuk karakter peserta didik, terutama di Tengah tantangan era globalisasi dan derasnya arus informasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui implementasi kebijakan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Bangka Tengah melalui pendekatan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang menyoroti empat factor utama: Komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan akhlak telah diimplementasikan secara efektif melalui program-program terstruktur dan dukungan kelembagaan yang memadai, guru, siswa, serta pihak manajemen madrasah menunjukkan komitmen fositif dalam penerapan nilai-nilai akhlak. Meski demikian, penguatan kompetensi guru dan kolaborasi dengan orang tua masih perlu di tingkatkan agar hasil kompetensi lebih optimal dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa MAN Insan Cendekia Bangka Tengah telah berhasil membangun fondasi pendidikan akhlak yang kuat, yang dapat menjadi model bagi Lembaga pendidikan lainnya.

Kata Kunci : Pendidikan akhlak, implementasi kebijakan, MAN Insan Cendekia.

Abstract

Ethical education plays a central role in shaping students' character, especially amidst the challenges of globalization and the rapid flow of digital information. This study aims to examine the implementation of moral education policies at the Insan Cendekia State Islamic Senior High School (MAN) in Central Bangka through George C. Edwards' public policy implementation theory, which highlights four key factors: communication, resources, implementer disposition, and organizational structure. The method used was a descriptive qualitative approach, and data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The results indicate that the moral education policy has been implemented effectively through structured programs and adequate institutional support. Teachers, students, and the madrasah management demonstrate a positive commitment to implementing moral values. However, strengthening teacher competencies and collaboration with parents still needs to be improved to optimize and sustain competency outcomes. These findings indicate that MAN Insan Cendekia in Central Bangka has succeeded in building a strong foundation for moral education, which can serve as a model for other educational institutions.

Keywords: Moral education, policy implementation, MAN Insan Cendekia.

A. Pendahuluan

Pendidikan akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang individu, terutama di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kuat. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan akhlak bukan hanya sekadar pelengkap dari pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membangun moralitas dan etika generasi penerus. Akhlak yang baik mencerminkan kesempurnaan iman seseorang, dan dalam sistem pendidikan Islam, penanaman nilai-nilai akhlak ini diharapkan mampu mencetak insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia.

Urgensi pendidikan akhlak semakin nyata ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. Di satu sisi, perkembangan teknologi membawa berbagai kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, Namun disisi lain, hal ini juga membuka ruang yang luas bagi masuknya budaya asing yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Realitas dilapangan menunjukkan bahwa fenomena dekadensi moral dikalangan generasi muda semakin mengkhawatirkan. Kasus kasus perundungan (bullying), kekerasan dilingkungan sekolah, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, menurunnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, hingga perilaku konsumtif dan hedonistic menjadi potret buram yang mencerminkan krisis akhlak dalam dunia pendidikan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi institusi pendidikan, khususnya sekolah dan madrasah, untuk tidak hanya focus pada aspek kognitif semata, tetapi juga memperkuat aspek afektif dan psikomotorik melalui pembentukan karakter dan akhlak mulia. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya peran pendidikan dalam pembentukan karakter bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan Keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan

untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh Keputusan-keputusan kebijakan (Rohman, 2009: 134).

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahapan ini kebijakan yang telah dibuat diterapkan. Jika kebijakan sudah dibuat tetapi tidak ada tindak lanjut untuk diimplementasikan maka kebijakan tersebut sia-sia. Namun, dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Komunikasi kebijakan dapat dilakukan dengan satu arah yaitu secara top-up dengan penunjukan tugas pimpinan kepada bawahan dan secara bottom up komunikasi yang terjadi bawahan ke atasan, komunikasi juga dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu proses timbal balik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya. Kebijakan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan public, karena kebijakan pendidikan akan menghasilkan aturan atau program yang dijalankan untuk kepentingan Masyarakat/public. Seperti yang dikatakan Fattah (2012: 132) bahwa kebijakan terkait dengan kebijakan public dan dibuat atas nama negara yang dibuat oleh instrument/ alat-alat negara untuk mengatur perilaku tiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas.

Pendidikan akhlak telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di madrasah dan sekolah-sekolah umum yang memiliki nuansa religius. Salah satu lembaga pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan akhlak adalah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, termasuk di Bangka Tengah. MAN Insan Cendekia dikenal sebagai madrasah unggulan yang memadukan kecerdasan intelektual dengan nilai-nilai keislaman, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berakhlak baik.

Namun, meskipun sudah ada kebijakan yang jelas tentang pendidikan akhlak di MAN Insan Cendekia Bangka Tengah, implementasi dari kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa permasalahan dan tantangan sering kali muncul dalam proses pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah. Tantangan-tantangan tersebut bisa bersumber dari berbagai aspek, baik itu dari internal lembaga pendidikan maupun dari faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan siswa.

Salah satu tantangan utama adalah masalah sumber daya manusia (SDM) di sekolah, terutama tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam mengajarkan pendidikan akhlak. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai dalam menyampaikan materi akhlak secara efektif kepada siswa. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh para guru dalam mengajarkan akhlak sering kali masih bersifat teoritis, tanpa melibatkan metode yang dapat menginternalisasi nilai-nilai akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa. Padahal, pendidikan akhlak tidak hanya tentang memahami konsep, tetapi juga tentang membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Di sisi lain, dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir siswa. Paparan terhadap konten digital dan media sosial yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam telah menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Hal ini menambah kompleksitas dalam upaya membentuk akhlak siswa, karena selain berhadapan dengan pengaruh lingkungan sekolah, siswa juga terpapar pada nilai-nilai global yang terkadang bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasikan kebijakan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasikan kebijakan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah ?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasikan kebijakan pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian, mengeksplorasi dan memahami makna dibalik perilaku, pengalaman, serta interaksi manusia dalam konteks tertentu. Dengan informan yang diwawancarai sebanyak 11 orang informan, Lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kabupaten Bangka Tengah. Dan dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2025

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

- a. Kepemimpinan Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah. Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak adalah komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan, karena hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tiga pertanyaan utama yang digunakan sebagai pedoman wawancara kepada para informan. Komunikasi yang efektif yang menjadi dasar implementasi kebijakan pendidikan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAN Insan Cendekia Bangka Tengah telah berupaya menyampaikan kebijakan pendidikan akhlak secara menyeluruh dimulai dari kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian agama dilanjutkan dengan kepala madrasah melanjutkan kepada para dewam guru melalui rapat rutin, surat edaran, dan program-program sosialisasi kepada seluruh elemen sekolah, kepala madrasah secara langsung terlibat dalam penyampaian visi, misi, serta pentingnya pendidikan akhlak kepada para guru, staf, siswa dan wali siswa. Beberapa hambatan dalam komunikasi, seperti persepsi yang berbeda diantara guru tentang metode yang tepat, diatasi dengan diskusi rutin dan forum evaluasi berkala.
- b. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah. Selain komunikasi, aspek sumber daya juga menjadi unsur

penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta dukungan anggaran mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan. Implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah ditunjang oleh sumber daya yang relatif memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari guru, pembina asrama, dan tenaga kependidikan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan karakter berbasis akhlak. Para guru tidak hanya mengajar secara kognitif, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam perilaku sehari-hari. Dari aspek sarana dan prasarana, MAN IC Bangka Tengah memiliki fasilitas yang mendukung, seperti ruang kelas yang kondusif, mushola sebagai pusat kegiatan keagamaan, serta asrama yang memfasilitasi pembinaan akhlak 24 jam. Selain itu, alokasi anggaran dari pemerintah pusat juga disalurkan untuk mendukung program pembinaan karakter, termasuk pelatihan guru dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai-nilai akhlak. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala dalam hal keterbatasan jumlah SDM yang secara khusus menangani pembinaan akhlak secara intensif, seperti pembina asrama atau guru BK. Hal ini memengaruhi intensitas pengawasan dan pembinaan terhadap siswa di luar jam pelajaran formal.

- c. Aspek penting berikutnya dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan. Disposisi ini sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tiga pertanyaan utama yang digunakan sebagai pedoman wawancara kepada informan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan di MAN IC Bangka Tengah terhadap implementasi pendidikan akhlak berada dalam kategori sangat mendukung. Kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan menunjukkan sikap positif dan antusias dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kepala madrasah berperan aktif dalam memfasilitasi berbagai program pembinaan akhlak, serta menjadi role model bagi seluruh warga madrasah. Guru-guru menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap visi dan misi madrasah, dan secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam proses pembelajaran. Sikap ini diperkuat dengan adanya kesadaran bersama akan pentingnya akhlak dalam membentuk karakter siswa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Lebih lanjut, pembina asrama juga memperlihatkan komitmen tinggi dengan melaksanakan kegiatan harian seperti shalat berjamaah, pengajian malam, dan monitoring perilaku siswa. Disposisi yang baik dari seluruh pelaksana ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan akhlak dan sikap orang tua yang mendukung pembelajaran akhlak ini dan siswa yang memahami akan pentingnya nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya.
- d. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi berperan penting dalam mengatur alur pelaksanaan kebijakan, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta sistem pengawasan dan koordinasi antar pelaksana. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi dari seluruh lapisan

birokrasi untuk memahami bagaimana struktur ini memengaruhi implementasi pendidikan akhlak di MAN Insan Cendekia Bangka Tengah. Struktur birokrasi di MAN IC Bangka Tengah cukup mendukung implementasi kebijakan pendidikan akhlak. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja, seperti bidang kesiswaan, kurikulum, keagamaan, dan asrama. Koordinasi antara kepala madrasah dengan wakil kepala madrasah serta pembina asrama berjalan efektif melalui rapat rutin dan forum diskusi strategis. SOP (Standard Operating Procedure) terkait pelaksanaan program pendidikan akhlak telah disusun dan dijalankan secara konsisten, seperti tata tertib madrasah, pedoman kegiatan keagamaan, dan sistem pembinaan di asrama. Struktur birokrasi yang sistematis ini memungkinkan setiap program akhlak dapat diimplementasikan secara terarah dan terukur. Namun demikian, beberapa kendala birokratis masih ditemui, seperti proses pelaporan yang terkadang memakan waktu dan kurang optimalnya pelibatan semua guru dalam evaluasi program akhlak. Meski begitu, secara umum struktur birokrasi mampu memfasilitasi jalannya kebijakan dengan baik melalui sistem koordinasi yang terintegrasi.

2. Pembahasan

- a. Dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan. Komunikasi dalam konteks ini mencakup penyampaian kebijakan, kejelasan isi pesan, konsistensi informasi, serta media dan jalur komunikasi yang digunakan oleh pembuat kebijakan pada pelaksana kebijakan dilapangan. Indikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kualitas komunikasi melalui penyusunan teknis pelaksanaan pendidikan akhlak, pelatihan internal bagi guru baru, serta mekanisme komunikasi dua arah yang melibatkan orang tua siswa secara aktif. Secara umum, komunikasi sebagai salah satu factor penting dalam model implementasi George C Edward III telah dilaksanakan di MAN IC Bangka Tengah, namun masih terdapat ruang perbaikan dan hal kejelasan teknis, konsistensi, dan partipasi stake holder. Penguatan komunikasi ini penting agar kebijakan pendidikan akhlak dapat diinternalisasi oleh seluruh pelaksana dan didukung oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Dalam teori George, sumber daya merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, sebaik apa pun isi kebijakan dan se jelas apa pun komunikasinya, implementasi tidak akan berjalan optimal. Sumber daya dalam konteks kebijakan akhlak di MAN IC Bangka Tengah terdiri dari tiga aspek utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber sarana dan prasarana pendukung. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap efektivitas program pendidikan akhlak di madrasah. SDM madrasah secara kualitas cukup mendukung, dukungan anggaran perlu ditingkatkan agar pendidikan akhlak bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, sarana prasarana sudah memadai namun untuk penguatan program, masih diperlukan inovasi sarana berbasis teknologi dan ruang edukatif khusus. Hal ini

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan akhlak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya secara proporsional, efisien dan berorientasi jangka Panjang. Sumber daya dalam model George C Edward III terbukti menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah. Ketersediaan SDM yang berkualitas, pendanaan yang memadai dan lingkungan fisik yang mendukung menjadi kekuatan utama madrasah. Namun, perlu strategi peningkatan dan pemerataan sumber daya agar implementasi kebijakan ini dapat terus berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

- c. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Goerge C. Edward III, disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu hal penting mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan pendidikan. Disposisi mencerminkan komitmen, motivasi, penerimaan, dan tanggung jawab dari pada pelaksana kebijakan terhadap isi dan tujuan kebijakan tersebut. Disposisi pelaksana di MAN IC Bangka Tengah pada umumnya positif dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan akhlak. Komitmen kepala madrasah, motivasi guru, serta penerimaan peserta didik terhadap nilai nilai akhlak Islami merupakan fondasi kuat dalam proses implementasi. Namun demikian masih terdapat catatan penting, diantaranya perlunya pelatihan penguatan nilai-nilai dasar akhlak bagi guru baru, perlu dibangun system pelibatan wali siswa dalam bentuk parenting akhlak dan forum musyawarah penting serta disposisi positif yang telah terbentuk perlu dijaga dengan system apresiasi dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelaksana.
- d. Struktur birokrasi merupakan factor yang tak kalah penting mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja, pembagian tugas, prosedur, alur komando, koordinasi antarbagian, serta fleksibilitas organisasi dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku, hirarkis, dan tidak adaptif dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan, sebaliknya, struktur birokrasi yang jelas namun fleksibel dan komunikatif akan mempercepat implementasi serta meminimalkan hambatan. Struktur birokrasi di MAN IC Bangka Tengah telah mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan akhlak melalui kejelasan jalur komando, koordinasi antarunit kerja, dan dukungan vertical dari instansi kemenag. Namun, tantangan masih terdapat pada perlunya penyederhanaan prosedur birokrasi untuk pengembangan program, kebutuhan peningkatan jumlah tenaga professional khusus pendidikan akhlak dan penguatan fungsi monitoring internal agar tidak hanya bersifat administratif. Terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah. Kejelasan organisasi, koordinasi, dan fleksibilitas menjadi kekuatan birokrasi madrasah, namun tetap dibutuhkan reformasi administrative dan penguatan sumber daya manusia agar struktur lebih responsive dan efektif.

D. Kesimpulan

1. Komunikasi dalam kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah, antar pemangku kepentingan relative efektif, meskipun masih diperlukan harmonisasi dalam penyampaian kebijakan secara lebih menyeluruh
2. Sumber daya dalam kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah khususnya sumber daya manusia, menunjukan peran aktif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak meskipun perlu peningkatan dalam aspek pedagogic afektif
3. Disposisi dalam kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah cukup baik, disposisi ditandai oleh tingginya semangat dan komitmen guru dalam mengintergrasikan nilai akhlak dalam pembelajaran
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan akhlak di MAN IC Bangka Tengah telah berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun kerja sama eksternasl seperti dengan orang tua perlu difasilitasi.

Referensi

Buku

- Amin, A. (1992). *Al-Akhlak*. Jakarta: PT bulan Bintang.
- Anis. I. (1972). *Al-Mujam Al-Wasit*. Mesir: Daar Al-Ma'arif.
- Baharudin. (2020). *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam*. Jawa Timur: Literasi Nusantara.
- Baidowi, Ach. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jawa Tengah: Almerta Media.
- Baraja, U. (1992). *Bimbingan Akhlak*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Chotimah, C. (2022). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Dahlan, R. (2016). *Konsep Pembelajaran Aqidah Akhlak*. Yogyakarta: Fublisher.
- Dalimunthe, S.S. (2024). *Filsafat Pendidikan Akhlak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fakhruroji, M. (2019). *Pola Komunikasi Dalam Model Kepemimpinan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- H.A.R Tilaar, Nugroho, R. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husaini, Adian. (2023). *Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal*. Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.
- Janawi. (2007). *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional*. Bangka: Shiddiq Press.
- Juddah, Moeh., et al. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Bintang Madani.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi Dan Adminitrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maftuhin, A. (2018). *Sanad Ulama Nusantara*. Bogor. Sahifa Publishing.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Meoleong, L. (2017). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhyidin. A., & Hodaipah. (2023). *Ngaji Akhlak Santri*. Surabaya. PP Nurul Islam.

- Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Persindo.
- Saebani, A.S., & Hamid, A.H. (2017). *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Solong, A. (2020). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Sleman: Deepublish.
- Suaedi, F., & Rahardian, R. (2023). *Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Era Governance*. Sleman: Deepublish
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Saputra, I., Erialdy, E., & Eliadi, D. (2023). Pengaruh Pemenuhan Character Building, Motivasi Belajar Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Peningkatan Mutu Taruna Poltekpel Banten. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 59-65.